



**ANALISIS HUBUNGAN TREND TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP TREND TINGKAT
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 -2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Dwi Aprizal

0221 17 228

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2022

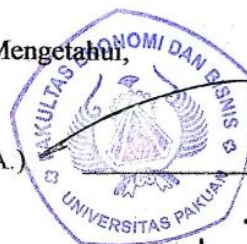
**ANALISIS HUBUNGAN TREND TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP TREND TINGKAT
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 -2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. CFE)

**ANALISIS HUBUNGAN TREND TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP TREND TINGKAT
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 -2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Rabu, 27 Juli 2022

Dwi Aprizal
0221 17 228

Menyetujui,

Ketua Sidang
(Drs. Monang Situmorang Ak., M.M., CA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Satsangkaryon Drs., Ak.,CA., MM)

Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Yan Noviar S.E., MM)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Aprizal

NPM : 022117228

Judul Skripsi : Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 27 Juli 2022



Dwi Aprizal
022117228

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

ABSTRAK

DWI APRIZAL 022117228 , konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2020. Di Bawah Bimbingan: SATSANGKARYON dan YAN NOVIAR 2022.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah dengan cara meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat mempengaruhi upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Sebagai objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemiskinan. Sumber data berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten sukabumi tahun 2016-2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan. Lokasi penelitian terdapat pada laporan realisasi keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang terdapat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis trend, dan uji korelasi pearson menggunakan aplikasi SPSS Ver 26.

Hasil dari pengujian korelasi pearson menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak memiliki hubungan korelasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2021. Hubungan variabel antara independen dan dependen tidak saling berkorelasi dengan keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tidak memiliki hubungan dan kuat antara kemandirian keuangan daerah, dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

KATAKUNCI : Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2020”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu saja terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun alhamdulillah terlepas dari itu penulis tetap bersungguh-sungguh, semangat serta tiada henti berdoa dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini segala proses di dalamnya penulis mendapatkan pencerahan, bantuan, dan petunjuk dari banyak pihak secara langsung dan tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT telah memberikan banyak sekali nikmat, karunia, hidayah, perlindungan, kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Mama dan papa yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan doa tiada henti untuk keberhasilan penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kakak dan adikku, keponakanku, dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa selama penyusunan.
4. Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Satsangkaryon, Drs., Ak., CA., MM membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Yan Noviar, SE., MM membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu bermanfaat saya.
11. Seluruh staf tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
12. Teruntuk seluruh grup Aib Keluarga, *Please read*, dan *Copy copy copy* yang selalu memberikan *support* dan doa selama penyusunan Skripsi ini.
13. Teruntuk sahabat-sahabatku SMP, SMA, dan Kuliah yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, sudah saling *support* dan doa.
14. Teruntuk teman-teman kelas F Akuntansi angkatan 2017 selama 4 tahun selalu bersama, kelas yang penuh suka, duka serta semangat selama perkuliahan di kelas.
15. Teruntuk Teman seper skripsian Nindya Najma, Retno Trisetyowati, Pinqanisa Alifia Wijaya, Rizki Raihan Ramadhan, Antania Hanjanilia Ristiyana, dan Muhammad Ilham Putra P atas batuan dorongan dan semangat selama pembuatan Skripsi ini.
16. Teman-teman Organisasi HMA FEB-Unpak yang mewarnai hariku dan berproses memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran di luar ilmu perkuliahan.
17. Teman-teman bimbingan semua dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Program Studi Akuntansi Tahun 2017 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaiannya skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Demikian penulis sampaikan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Juli 2022

Penulis

Dwi Aprizal

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah.....	8
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	9
2.1.4 Tugas Pokok Pemerintah	10
2.1.5 Otonomi Daerah.....	12
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.2.1 Pengertian APBD.....	13
2.2.2 Struktur APBD.....	14
2.3. Akuntansi Sektor Publik.....	15
2.3.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	15
2.3.2. Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	15
2.3.3. Jenis- Jenis Akuntansi Sektor Publik.....	16
2.3.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik	17
2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18

2.4.1 Tujuan pengukuran kinerja	18
2.4.2 Manfaat pengukuran kinerja	19
2.4.3 Indikator Pengukuran Kinerja.....	19
2.4.4 Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja.....	20
2.4.5 Permasalahan pengukuran Kinerja Sektor Publik	21
2.4.6 Parameter Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.5 Kemandirian Keuangan Daerah	23
2.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah	25
2.6 Kemiskinan.....	25
2.6.3 Penyebab Kemiskinan.....	29
2.6.4 Indikator Kemiskinan dan Ukuran kemiskinan	29
2.7 Analisis Trend	31
2.8 Penelitian Sebelumnya	34
2.10. Kerangka Pemikiran	48
2.11. Hipotesis Penelitian.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	51
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	52
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	52
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	52
3.6 Metode Pengumpulan Data	53
3.7. Metode Analisis.....	53
3.7.1 Analisis Trend.....	53
3.7.2 Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1 Kabupaten Sukabumi.....	55
4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	58
4.2 Kondisi atau fakta dari Variabel yang Diteliti Kabupaten Sukabumi.	60
4.2.1 Kemandirian Keuangan daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.....	60
4.2.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi.....	64
4.3 Analisis Data	64
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	65

4.3.2 Penerapan Model Untuk Meramalkan Trend Tingkat Kemandirian Keuangan daerah dan Trend Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.....	65
4.3.4 Uji Hipotesis	72
4.4 Pembahasan Penelitian	72
4.4.1 Perkembangan Kecenderungan (Trend) Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	72
4.4.2 Perkembangan Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.....	74
4.4.3 Hubungan Antara Kecenderungan (Trend) Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan.	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah	25
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	52
Tabel 4. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020	60
Tabel 4. 2 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah	60
Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif	65
Tabel 4. 4 Tabel Metode Least Square Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi.....	66
Tabel 4. 5 Tabel Metode Least Square Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi .	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Korelasi Pearson.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Trend Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi... 3	3
Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi..... 4	4
Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan 28	28
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran..... 49	49
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sukabumi Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Gambar 4. 2 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Sukabumi..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Gambar 4. 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Gambar 4. 5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. 9	9
Gambar 4. 6 Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021 67	67
Gambar 4. 7 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi 2016-2021.....68	68
Gambar 4. 8 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi 2016-2021.....71	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Hukum 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU no. 32 tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dengan pemberian otonomi daerah, baik pemerintah Provinsi dan kota/kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerah. Pemerintah daerah harus lebih mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

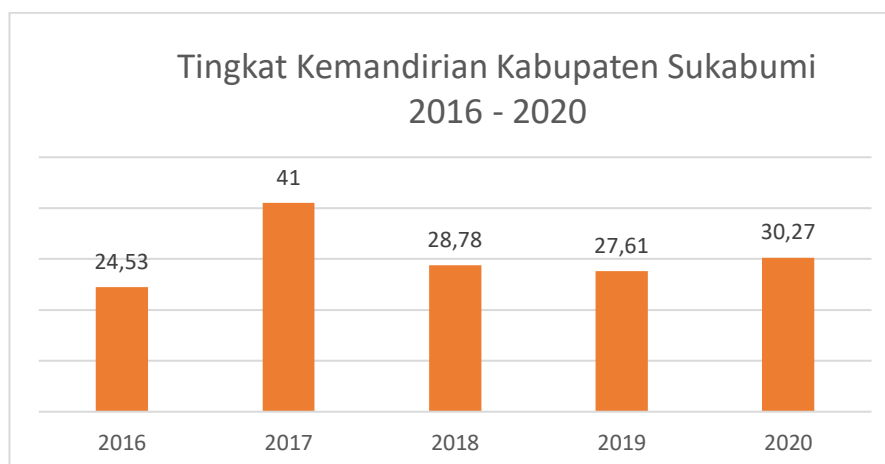
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa program penanggulangan kemiskinan masih dikoordinasikan dalam klaster program, yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, kelompok program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang dapat menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja masih di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Di era otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari

Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi pendapatan menurut PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Pemerintahan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan otonomi daerah. Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukabumi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengelolaannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Dalam faktor-faktor tersebut menjadikan sebuah daerah otonomi menjadi daerah yang mandiri secara keuangan. Tingkat Kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Mahmudi, 2018) menjelaskan kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka kemandirian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berikut merupakan grafik tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi :

Gambar 1. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (dalam %)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik diolah peneliti, 2021

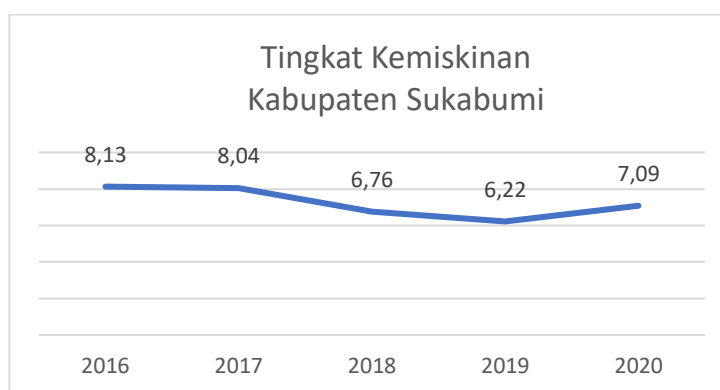
Berdasarkan Gambar 1.1 disajikan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 mengalami persentase yang tidak konsisten/fluktuatif dan masih dalam tingkat rendah sekali sampai rendah. Sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018” bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih dalam tingkatan rendah. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat sehingga menyumbang angka minus terhadap angka kemandirian Jawa barat. Dan jika dibandingkan dengan kabupaten yang berdekatan dengannya atau berhimpitan yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi berada jauh di bawahnya. Rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi adalah 30.23 (rendah), sedangkan Kabupaten Bogor mencapai 62.45 (sedang).

Adanya kebijakan otonomi daerah dengan cara meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat mempengaruhi upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan adanya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kemandirian pengelolaan keuangan dan pengendalian tingkat kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian tujuan di tingkat daerah maupun nasional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah daerah yang dikelilingi sumber alam yang luas mulai daerah pegunungan hingga laut. Tetapi keadaan tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terlihat pada angka kemiskinan di sukabumi yang tinggi. Dengan keadaan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi masih perlu kerja keras dalam mengayomi dan mengajak masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Belum lagi pada tahun 2020 terdapat virus pandemi

covid-19 yang banyak mempengaruhi pendapatan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi meningkat padahal empat tahun sebelumnya cenderung memiliki trend menurun yang berarti tingkat kemiskinan sudah mulai membaik tetapi pada tahun 2020 tersebut meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran Tingkat kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari. Berikut merupakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi tercermin dalam grafik di bawah ini :

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah peneliti, 2021

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 7,09 persen, Artinya ada kenaikan sebanyak 0,87 persen yang berarti jumlah penduduk miskin meningkat.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi masih harus diturunkan karena terjadi kenaikan pada tahun 2020, terlebih saat memasuki masa pandemi corona bahkan mengalami resesi perekonomian. Menurut Hadi (2021) penyebab naiknya tingkat kemiskinan disebabkan pendekatan melalui pengeluaran konsumsi masyarakat, sementara kemampuan untuk memenuhi pengeluaran cenderung konstan. Hal itu diduga karena dipicu oleh pandemi covid-19 yang masih mewabah dalam satu tahun terakhir. Sebab semenjak kejadian luar biasa yaitu adanya pandemi Covid-19 di tanah air menyebabkan perekonomian turun. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Milda (2021) Kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif untuk mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Bogor. Taufik (2021) kesimpulan dari penelitian merupakan variabel kapasitas keuangan daerah (kemandirian keuangan daerah). Menurut Rosyafah (2016) tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang dimana pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembangunan sektor ekonomi dengan pemberian bantuan modal bagi industri padat karya, mengadakan pelatihan usaha, dan lain-lain. Suryanata (2019) Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai tahun 2020 yang masih rendah sekali hingga ke rendah dan ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Sukabumi terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi, dengan menciptakan kemandirian daerah dalam menjalankan fungsinya dengan dengan baik dalam membangun daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, melemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan yang relatif tinggi menggambarkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah masih rendah, begitu juga sebaliknya

Berdasarkan keadaan tersebut menarik untuk dianalisis antara variabel kecenderungan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah hubungannya dengan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dengan berjudul “ **Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2020**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Kecenderungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang diikuti dengan kecenderungan tingkat kemiskinan yang terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2018 tingkat kemandirian mengalami penurunan cukup tajam tetapi tingkat kemiskinan tetap mengalami penurunan dan pada tahun 2020 tingkat kemandirian keuangan meningkat sedangkan tingkat kemiskinan meningkat pula.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Kecenderungan (Trend) Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020?
3. Bagaimana kecenderungan hubungan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis sebagai metode pembelajaran untuk melakukan analisis atas permasalahan yang terjadi serta sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah sehingga dapat menyimpulkan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara trend tingkat kemandirian keuangan terhadap trend tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi periode tahun 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya :

1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama perkuliahan. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2020.

2. Kegunaan Praktik

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melengkapi dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah serta membandingkan dengan aplikasi yang

sesungguhnya di tempat penulis melakukan penelitian serta menjadi sumber informasi yang berguna untuk skripsi yang merupakan salah satu syarat menempuh kesarjanaan ini.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi para mahasiswa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah

Melihat definisi pemerintahan daerah, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat Agustino (2008). Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertahanan;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Sunarno, 2008).

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja

pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

2.1.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Menurut Syafeii (2011), menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pula Talizi dalam Inu Kencana Safie menyebutkan pengertian asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman , peraturan-peraturan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara Negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas Umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Tugas Pokok Pemerintah

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun ada pula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Menurut Syauckani (2009) dalam bukunya. Menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai merupakan tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Bisa juga dikatakan

sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Namun karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan.

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa. Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh (Rasyid, 2000) . Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Hal. 13. sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Selanjutnya, (Rasyid, 2000) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pemerintahan modern fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Pelayanan (*public service*)
2. pembangunan (*development*)
3. pemberdayaan (*empowering*)
4. pengaturan (*regulation*).

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya

dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya.

2.1.5 Otonomi Daerah

Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/ daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri.” Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/ kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dengan adanya reformasi dibidang Pemerintahan maka UU NO.5/1974 diganti dengan UU No.22/1999 yang direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah dan UU No.25 yang direvisi dengan UU No.34 tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. Kedua undang-undang ini memberi kewenangan bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah menurut UU No.22/1999 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Pencapaian tujuan otonomi daerah ini tentunya tergantung dari kesiapan masing- masing daerah dan kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya masing-masing Halim (2007) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan dari penghasilannya melalui pajak langsung. Dalam model otonomi relatif, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Model agensi merupakan model pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan. Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Sujono (2014) Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian APBD

APBD merupakan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah dalam menutupi pengeluaran daerah (Mamesah dalam Halim, 2007;20). Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) (pasal 1 UU No.32 tahun 2004. APBD adalah Suatu rencana

pekerjaan keuangan (*Financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran (Abdul Halim 2007, hal 20).

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

2.2.2 Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut :

a) Pendapatan daerah

Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Standar Akuntansi Pemerintah, 2005)

b) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah adalah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c) Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu;

1. Penerimaan Pembiayaan: Penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, pinjaman dalam negeri lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non bank (Mahmudi, 2010;76)

2.3 Akuntansi Sektor Publik

2.3.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo, (2018) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Menurut (Majid, 2019) Akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajer sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme dan perlakuan akuntansi pada organisasi publik yang terdiri atas proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menjadi sebuah informasi keuangan bagi pihak – pihak terkait untuk pengambilan keputusan.

2.3.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik, seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukannya. Itu semua telah menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari 50 tahun. Apabila terdapat pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan, itu akan berdampak pada kekosongan pengaturan praktik akuntansi di sektor publik. Maka, rekomendasi konkret yang dapat dieksekusi sebagai langkah awal adalah penataan kembali akuntansi sektor publik. Salah satu hal yang amat substansi adalah konsensus terhadap ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam (Inapty *et al.*, 2017) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara.

2.3.3 Jenis- Jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Biduri (2018) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk Instansi Pemerintah. Contohnya meliputi :

- a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan Badan Negara seperti: KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. contohnya:

- a. Perguruan Tinggi BHMN.
- b. Rumah Sakit Milik Pemerintah seperti RSCM, RS daerah.
- c. Yayasan-Yayasan Milik Pemerintah.

2.3.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Bastian, 2014) siklus akuntansi sektor publik antara lain :

1. Transaksi

Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

2. Analisis Bukti Transaksi

Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3. Pencatatan Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4. Pengikhtisaran

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

5. Pelaporan

Selama periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Indra (2014) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Menurut (Mahsun, 2006) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2004) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan.

2.4.1 Tujuan pengukuran kinerja

Mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik Mahmudi (2007) yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
- 5) Memotivasi pegawai.
- 6) Menciptakan akuntabilitas public.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan Mardiasmo (2009) yaitu :

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan pengukuran kinerja menurut (Ihyaul Ulum, 2009, hal;20) adalah :

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan pengukuran kinerja dapat disimpulkan, yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian organisasi.
- 2) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- 3) Memotivasi pegawai.
- 4) Untuk mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan
- 5) Menciptakan akuntabilitas public.

2.4.2 Manfaat pengukuran kinerja

Manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik Mardiasmo (2009) yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki organisasi.
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.4.3 Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Daerah Mahsun, (2012)

meliputi :

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infrastruktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Proses*), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
 - a) Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya :
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2.4.4 Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja

Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja dikelompokkan dalam dua kategori Ulum (2009), yaitu :

Informasi Finansial

Penilaian laporan kerja financial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

1) Varian pendapatan

Kesenjangan anggaran pendapatan terjadi ketika target pendapatan ditentukan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Untuk mengetahui berapa besaran kesenjangan anggaran pendapatan ini, maka terlebih dahulu harus “diketahui” berapa potensi pendapatan, yang bisa saja bersifat laten (tersembunyi) karena tidak dinyatakan secara eksplisit (tertulis). Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan, sumber-sumber pendapatan terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari, Pajak daerah, Retribusi daerah, Bagian laba usaha daerah, Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK).
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, Dana darurat, Bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, Dana penyesuaian, Dana otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.
- 2) Varian pengeluaran

Varian pengeluaran dalam APBD terdiri dari :

- a) Varian belanja rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancer, rutin dan secara terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

- b) Varian belanja bangunan

Anggaran pembelanjaan pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian, kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya Halim (2004)

- b. Informasi Non finansial

Informasi Non finansial dapat dijadikan tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses kerja manajemen, informasi non finansial biasanya digunakan dalam pengukuran kinerja dalam menggunakan balanced scorecard Ulum (2009). Informasi non finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau dinamakan sebagai *key success factor*, *key result* atau *pulse point*. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan maka variabel harus disesuaikan. Beberapa karakteristik variabel kunci, yaitu :

- 1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi..
- 2) Sangat volatile dan dapat berubah sangat cepat.
- 3) Perubahannya tidak dapat diprediksi
- 4) Jika terjadi perubahan harus segera ambil tindakan
- 5) Variabel tersebut dapat diukur.

2.4.5 Permasalahan pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut I Gusti Agung (2010) mengatakan permasalahan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu :

- 1) Pemerintah memberikan kewajiban dan nilai bukan produk/barang kepada masyarakat.
- 2) Organisasi-organisasi public biasanya lebih banyak melibatkan suatu proses daripada produk. Dalam hal pembuatan suatu kebijakan, banyak pihak yang terlibat dalam proses konsultasi dan negosiasi antar instansi.
- 3) Suatu proses yang baik belum tentu menghasilkan produk akhir yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 4) Kinerja dari organisasi public saling berkaitan satu dengan yang lainnya, suatu hasil dicapai melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- 5) Unsur sebab-akibat dalam sektor publik sering kali tidak diketahui dan tidak jelas
- 6) Permasalahan pengukuran kinerja akan semakin meningkat manakala lingkungan organisasi sangat dinamis seperti kebijakan/peraturan yang selalu berubah-ubah.

Menurut Moehariono (2014; 118) salah satu hal penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam upaya peningkatan dan akuntabilitas sektor publik adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan Fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan dan pembangunannya.
- 2) Penataan sistem dan proses manajemen pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan berkinerja tinggi.
- 3) Manajemen kinerja yang berorientasi pada *outcome oriented* sehingga apa yang dihasilkan oleh mereka melalui proses manajemen benar benar efisien dan efektif serta ekonomis sehingga menunjukkan kinerja serta akuntabilitas yang baik.

2.4.6 Parameter Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Parameter Kinerja Keuangan pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2007;231). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah

tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Abdul Halim, 2007;232).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016)

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan.

Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2011)

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Mahmudi (2018) terdapat beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD salah satunya adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

2.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Amalia and Purbadharmaja, 2015). Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Menurut (Pambudi, 2008) dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah

dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut. Sementara itu, kemandirian keuangan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, di mana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, di mana kedua hal tersebut merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (Ulum, 2009).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi pendapatan menurut PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2018).

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Mahmudi, 2018) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berikut merupakan kategori Kemandirian Keuangan Daerah yang dirilis Badan Pusat Statistik Jawa Barat:

Tabel 2. 1 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Tingkat Efektivitas	Kategori
>75%	Tinggi
>50% - 75%	Sedang
>25% - 50%	Rendah
0 - 25%	Rendah Sekali

Sumber: Badan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

2.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak/ retribusi daerah,
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah,
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah,
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara berencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.6 Kemiskinan

2.6.1 Kemiskinan Secara Umum

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai

pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Agus (2005) Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Andri (2009) Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa. Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Agus (2005) Pengertian kemiskinan ekonomi (harta) secara umum di atas, yaitu dimana masyarakat mengalami kekurangan kebutuhan dalam kehidupan (makanan, pakaian, tempat tinggal), hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, dan 480 kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Menurut Alfian (2000) mendefinisikan mengenai jenis-jenis dari kemiskinan. Dalam pemaparannya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus di dalam sektor pertanian. Dengan kondisi iklim yang tidak menentu membuat petani tidak mampu untuk mengolah dan memaksimalkan lahan pertanian yang dimiliki.

2. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem budaya tradisi masyarakat yang

sudah melekat. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

3. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu. Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka.

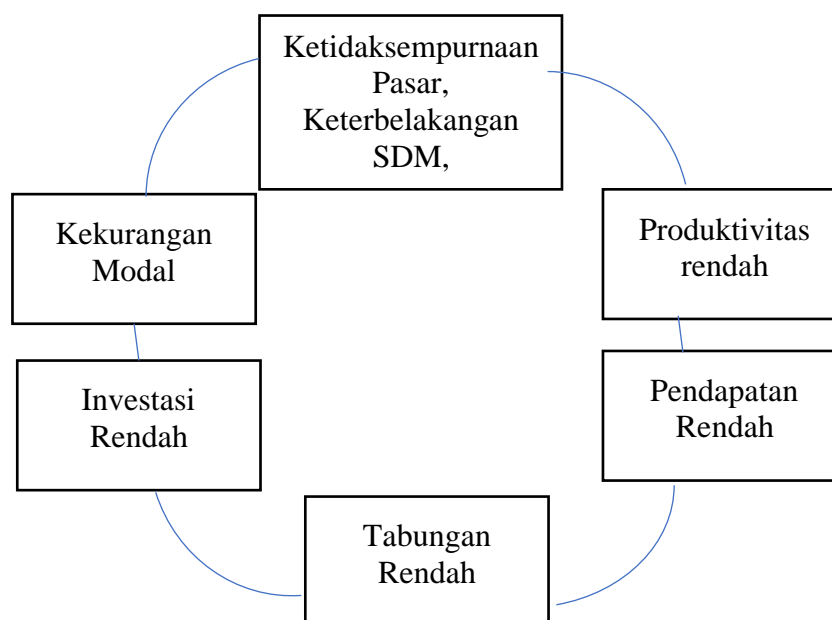
Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antara hubungan bagian bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya.
4. Latency (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. (Alfian, 2000)

Menurut teori Kuncoro (1997) Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan

Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. berikut gambar Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse.

Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan



2.6.2 Jenis-jenis Kemiskinan dan Ciri-ciri Penduduk Miskin

Menurut Harry (2007) dalam Nurwati (2008) Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan bersifat kronis, dan kemiskinan bersifat sementara.

1. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang dapat dilihat dari kondisi alam, infrastruktur, yang sangat sulit untuk akses perekonomian. Biasanya berada di tempat yang terpencil, yang sangat sulit untuk kegiatan apapun demi kelangsungan hidup. Kondisi ini membuat kemiskinan menjadi berkepanjangan.
2. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang bersifat sementara atau pada waktu tertentu kondisi kehidupan dapat berubah menjadi baik, misalnya masyarakat mengalami bencana alam, pada saat itu masyarakat mengalami kemiskinan sedangkan pasca bencana bisa kembali hidup dengan normal.

Menurut Suryawati (2005) kemiskinan dapat dilihat dari ciri-ciri kelompok penduduk sebagai berikut :

1. Mempunyai pendidikan yang rendah.
2. Kebanyakan mempunyai usaha sendiri atau bekerja dalam sektor informal, yang sifatnya kecil.

3. Tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya tanah, keterampilan dan peralatan untuk bekerja.
4. Kurangnya memperoleh fasilitas umum.

2.6.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Suwadi (2014:25) Kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
2. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Kedua yaitu Kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

1. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
2. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
3. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

2.6.4 Indikator Kemiskinan dan Ukuran kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, ada berbagai indikator yang biasa dipergunakan. Untuk mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin di Indonesia, menurut BPS, adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan dapat diukur dengan cara menggunakan perhitungan *Head Count index*, adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Berikut merupakan indikator- indikator kemiskinan :

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan Nilai Kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi didasari oleh kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 komoditi (padi-padian umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan lainnya).

$$Gm = GKM - GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

2. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

5. Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

6. Ukuran Bank Dunia

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- a. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- b. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
- c. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Menurut Sajogyo (dalam Suwadi 2014:27) menjelaskan tentang teori dari lincoln arsyad kemiskinan dapat dilihat atau diukur dari :

1. Indikator Tingkat Konsumsi Beras

mengukur berapa banyak tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, dengan rincian ada tiga kategori miskin yaitu sangat miskin, miskin dan nyaris miskin.

2. Indikator Tingkat Pendapatan

Dalam pengukuran pendapatan dilihat dari pendapatan perkapita. Dan dapat dilihat dari Garis kemiskinan, Jumlah penduduk miskin di ukur dari pengeluaran per hari satu dolar Amerika. Kalau ukuranya dua dolar per hari maka termasuk miskin.

2.7 Analisis Trend

Menurut (Nurmalasari, 2017) Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Dan menurut (Amirullah, 2007) metode analisis merupakan suatu bentuk pengendalian di dalam menguraikan informasi ke dalam bagian- bagian atau komponen-komponen dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap permasalahan yang timbul dan menjadi kebutuhan bagi peneliti untuk mencari kebenaran. Metode Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai beberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Metode peramalan kuantitatif diuraikan sebagai berikut:

Menurut (Gempur, 2012) ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan yang digunakan pada analisis trend, yaitu:

- a. Jika kurva trend semakin naik, maka menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat.
- b. Jika kurva trend semakin menurun, maka menunjukkan perkembangan yang semakin menurun.

Peramalan suatu variabel dengan variabel bebasnya waktu disebut dengan trend. Trend dibagi menjadi tiga metode, yaitu: trend linear, trend parabolik, dan trend eksponensial. Dalam menentukan penggunaan salah satu dari tiga metode yaitu membuat scatter diagram data observasinya. Jika scatter diagramnya menunjukkan kenaikan linear maka digunakan trend linear. Tetapi bila tidak dapat digunakan trend linear maka diperhatikan apakah membentuk parabola baik yang terbuka keatas atau terbuka kebawah. Sehingga trend parabolik yang cocok untuk hal tersebut. Jika trend parabolik ini yang cocok, sebenarnya terdapat sebuah pengujian kecocokan yang menggunakan pengujian Chi-Kuadrat. Selanjutnya jika scatter diagram tidak menunjukkan trend linear dan parabola maka perlu diperhatikan secara rinci apakah kenaikannya secara berlipat ganda atau menghitung terlebih dahulu logaritma data asli kemudian digambarkan. Jika ternyata memperlihatkan bentuk linear maka disebut trend eksponensial. Adapun persamaan metode trend sebagai berikut:

- a. Trend linear : $Y = a + bX + e$
- b. Trend parabolik : $Y = a + Bx + cX + e$
- c. Trend eksponensial : $Y = a b + e$

Trend linear adalah suatu trend yang kenaikan atau penurunan nilai yang akan diramalkan naik atau turun secara linear. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, kuartalan, triwulanan, bulanan hingga mingguan. Waktu yang digunakan tergantung kebutuhan atau pemakaian model. Tetapi data yang digunakan harus tersedia sesuai dengan kebutuhan. Garis trend linear dapat ditulis sebagai persamaan garis lurus:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y : data berkala

X : waktu (hari, minggu, bulan, tahun)

a,b : bilangan konstan.

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan trend linear ditentukan dengan rumus:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

Keterangan:

Y = nilai data berkala

n = jumlah periode waktu

X = variabel waktu

Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu (X). Variabel waktu untuk data ganjil dan genap memiliki nilai-nilai yang berbeda.

- a. Untuk jumlah periode waktu ganjil, nilai-nilai X: ..., -3, -2, -1, 0 + 1, 2, 3, ...
- b. Untuk jumlah periode waktu genap, nilai-nilai X:, -5, -3, -1, + 1, 3, 5, ...

Metode analisis trend dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Freehand Metode garis trend dibuat secara bebas tanpa menggunakan rumus matematika. Ramalan dapat diperoleh secara sederhana dengan penarikan garis trend untuk periode yang diramalkan.
- b. Kuadrat Terkecil Satu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan trend data. Garis trend ini mempunyai sifat-sifat:

1. Penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis adalah nol.
2. Penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data data historik dari garis adalah minimum.
3. Garis melalui rata-rata X dan Y.

Analisis time series dapat dilakukan dengan beberapa metode yang ada salah satunya adalah teknik least square. Metode ini mencocokkan fungsi sekumpulan data.

1. Mencari persamaan trend Persamaan trend metode linear least square adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

Keterangan:

Y = nilai Trend

a = bilangan konstan

b = slope atau koefisien kecondongan garis trend

X = waktu (bulan, kuartal,tahun)

Y = data berkala

2. Merubah Bentuk Persamaan Trend “Y” pada persamaan trend yang telah ditentukan dapat menyatakan produksi setiap tahunnya. Persamaan tersebut dapat diubah dengan cara sebagai berikut:

- a. Memindah Origin

Tahun yang merupakan origin dapat di pindah, di dalam memindahkan origin, yang diganti hanya konstantanya saja dan nilai a yang baru sebesar nilai trend pada tahun yang menjadi origin baru.

- b. Trend Rata-rata

Dari persamaan trend tahunan yang telah diperoleh dapat diubah menjadi persamaan trend rata-rata setiap bulan, yaitu dengan membagi dengan 12 dan b dengan 12. Sedangkan jika disajikan trend rata-rata tiap kuartal maka a dibagi 4 dan b dibagi 4. jika di substitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan maka akan didapatkan nilai trend (Y) yang merupakan trend rata-rata.

c. Persamaan Trend Bulanan dan Kuartalan

Trend bulanan adalah trend dari bulan satu ke bulan berikutnya, menunjukkan perkiraan kenaikan atau perubahan tiap bulannya. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu bulannya. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu tahunan akan diubah menjadi trend bulanan, maka a dan b dibagi 12. Trend kuartalan adalah trend yang menunjukkan perubahan dari kuartal. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu tahun akan diubah menjadi trend kuartalan, maka a dibagi 4 dan b dibagi 4. Kalau dari persamaan trend tahunannya yang persamaan X setengah tahun dan akan diubah menjadi trend bulanan a dibagi 12 dan b dibagi $(12)/2$, sedangkan jika diubah menjadi trend kuartalan a dibagi 4 dan b dibagi $(4)/2.5$.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa skripsi maupun jurnal-jurnal melalui internet.

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini maka selain dari kajian teori yang telah dipaparkan, dilakukan juga review terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini didasarkan atas kesamaan objek penelitian, yaitu Variabel – variabel terkait yaitu kemandirian keuangan daerah dan Tingkat Kemiskinan. penelitian Sebelumnya akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel 2.2 :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Irma Suryani Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 (2019)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Analisis Deskriptif	Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 masuk dalam kategori “Rendah”.Pendapatan Asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Taufik Hidayat B Tahawa Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dan Persentase Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 – Tahun 2018 2021	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Persentase Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi	Rasio : Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Rasio : Persentase Kemiskinan Rasio : Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,638 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,688 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%. Hasil ini mengindikasikan tidak terdapat pengaruh antara variabel kemampuan keuangan daerah (desentralisasi fiskal) (X2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel (X3) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,371 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,688 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%. Hasil ini mengindikasikan terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan (X3) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
3	Jalu Aji Prakoso Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap	Kemampuan Keuangan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio : Kemampuan Keuangan Rasio :	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah 2021	Pertumbuhan Ekonomi	Kemandirian Keuangan Daerah Rasio : Pertumbuhan Ekonomi Rasio : Kemiskinan		Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kota yang memiliki kriteria kemandirian keuangan konsultatif, yaitu Kota Tegal dan Kota Semarang. Selain kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan kondisi kemandirian keuangan yang instruktif. Hasil analisis model pertama menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Eva Syahfitri Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh 2018	Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio : Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil uji t untuk variabel tingkat kemiskinan diperoleh hasil t-hitung sebesar -3.289 dengan signifikansi sebesar 0.001. nilai signifikan untuk variabel tingkat kemiskinan menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 0.05 dan nilai t-hitung $-3.289 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.99045 yang artinya tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan apabila tingkat kemiskinan semakin tinggi maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah.
5	Milda Handayani Analisis Kemandirian Dan Kemampuan	Kemampuan Keuangan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio : Kemampuan Keuangan Rasio :	Regresi Linier Berganda	Derajat otonomi fiskal pada Kabupaten Bogor dari tahun 2000 hingga tahun 2019 berada pada

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bogor 2021	Kemiskinan	Kemandirian Keuangan Daerah Rasio : Kemiskinan		rentang 0% sampai dengan 25%, hal ini dapat disimpulkan bahwa sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Bogor rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bogor dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat rendah sekali, dimana peranan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih dominan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Sementara derajat desentralisasi fiskal mempunyai nilai rata – rata 24,07%, sehingga dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah Kabupaten

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>Bogor dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dikategorikan cukup. Untuk analisis regresi linier berganda, baik kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap persentase penduduk miskin. Kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,295 yang berarti dalam pelaksanaan otonomi daerah 29,5% telah mampu untuk mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Bogor. Sementara nilai kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,171 yang berarti dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bogor sudah bisa mengurangi penduduk miskin di wilayahnya.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Mahfud Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio : Pendapatan Asli Daerah, Rasio : Dana Perimbangan, Rasio : Dana Otonomi Khusus Rasio : Tingkat Kemiskinan Rasio : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Analisis regresi Linier Berganda	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 2. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 3. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 4. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
7	Afni Rizkiani Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di	Kemandirian Keuangan Daerah Kemiskinan	Rasio: Kemandirian Keuangan Daerah Rasio :	Regresi Data Panel	Kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2021		Kemiskinan		<p>terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2012-2019. Ini menunjukkan setiap kenaikan satu persen kemandirian keuangan daerah akan menurunkan kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya kemandirian keuangan daerah. Dimana, saat kemandirian keuangan daerah meningkat dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh.</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2012-2019. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan kemiskinan di Aceh. 3. Hasil dari probabilitas F</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>sebesar $0,0000 < 5$ persen, artinya tingkat kepercayaan uji F sebesar $0,0000 < 5$ persen. Artinya kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2012-2019. 4. Hasil angka R Squared sebesar 0.320783, artinya variabel-variabel bebas dalam penelitian lain di luar model regresi, sehingga dana PKH yang diterima dapat diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan keluarga.</p>
8	<p>Noni Kumpangpune Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung</p>	<p>Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan</p>	<p>Rasio : Kinerja Keuangan Daerah Rasio : Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Rasio :</p>	<p>Analisis Rasio keuangan</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	2020		Dampaknya Terhadap Kemiskinan		<p>ekonomi di Kota Bitung.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.</p> <p>6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.</p> <p>7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung.</p>
9	Suryanta Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran	Rasio : Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Rasio :	Regresi Linier sederhana	Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dan Kemiskinan Di Kota Depok 2019	Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi Rasio : Pengangguran Rasio : Kemiskinan		pertumbuhan ekonomi (PDRB) Pemerintah Kota Depok selama periode tahun 2006-2015. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan akan berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya semakin kecil pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan maka akan pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Depok selama periode tahun 2006-2015. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah yang dimanfaatkan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>untuk pembangunan akan berdampak pada semakin turunnya angka pengangguran, demikian pula sebaliknya semakin kecil pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Depok selama periode tahun 2006 – 2015. Hal ini dapat disebabkan masih adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga pendapatan daerah yang semakin meningkat tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Depok.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Ahmad Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2020	Tingkat Kemandirian Keuangan	Rasio : Tingkat Kemandirian Keuangan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian diperoleh bahwa kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil. Dikatakan demikian karena rasio kemandirian keuangan dalam hal ini rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah relatif kecil yaitu hanya rata-rata 10,97 persen dalam lima tahun terakhir. Apabila kita bandingkan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan seluruh daerah tingkat II di Indonesia pada tahun 2018, kita juga dapat mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tingkat II yang ada Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil, karena pada tahun 2018 rasio kemandirian daerah tingkat II seluruh Indonesia adalah 15,50

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					persen, sementara rasio kemandirian keuangan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata hanya 12,02 persen. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif besar terhadap sumber dana dari pemerintah pusat.

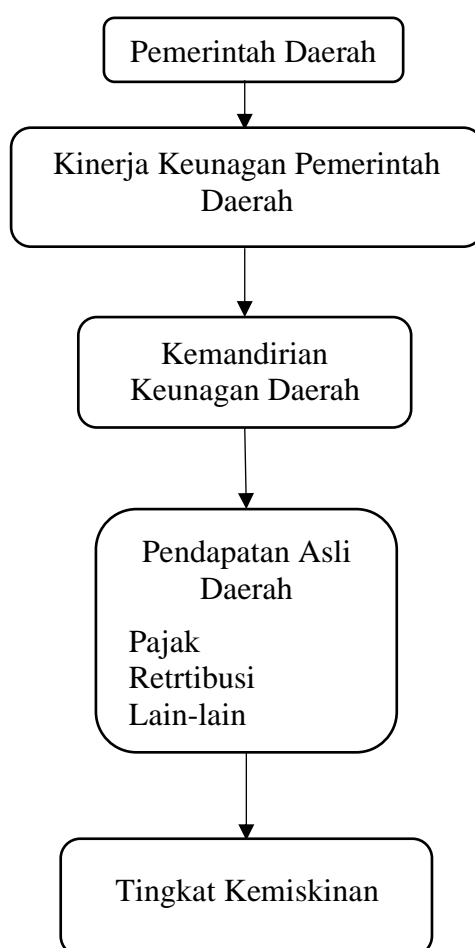
2.10 Kerangka Pemikiran

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki telah dikembangkan dengan baik dan maksimal. Pengembangan potensi ini juga akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Hal ini pemerintah daerah mengikutsertakan peran masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah masyarakat harus berperan aktif dalam kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut mulai dari Retribusi daerah dan pajak dari masyarakat. Semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka suatu daerah dapat dikatakan lebih mandiri (Hidayat dan Nalle, 2017). Sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lepas dari tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum dan dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah. Daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang baik diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi dan bersifat inklusif, artinya dampak pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Indikator utama yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu terlihat dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya

dengan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Kamaroellah, 2017). Oleh Karena itu pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dalam menciptakan kesempatan kerja guna dapat menyerap pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Purnomo et al, 2021). Rosyafah (2016) kebijakan otonomi daerah dengan cara meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat mempengaruhi upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan adanya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



2.11 Hipotesis Penelitian

Suatu topik penelitian perlu dikembangkan hipotesis penelitian jika analisis permasalahan menggunakan statistik uji hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan

sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₀ : Trend Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tidak memiliki Hubungan terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.

H_a : Trend Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki Hubungan terhadap Trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dengan studi kasus dibatasi pada pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan menjawab rumusan masalah yang ketiga dan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti, baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya (Maryadi *et.al* .2010:13). Jadi objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian atau sesuatu yang menjadi kajian atau yang diteliti oleh peneliti. Objek dalam penelitian ini merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Menurut Hamidi (2005) mengatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, kelompok, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dapat diartikan bahwa unit analisis merupakan apa yang ingin dianalisis dalam penelitian. Penggunaan unit analisis dalam penelitian ini yakni terdiri tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut di kabupaten Sukabumi

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya laporan realisasi keuangan yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2016-2020 yang sudah diolah dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data yang memiliki hubungan dengan penelitian bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel dari “Analisis Hubungan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Trend Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi 2016-2020)”

3.5 Metode Penarikan Sampel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Tingkat Kemandirian Keuangan (Variabel X)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$	Naik/ turunnya rasio Tingkat kemandirian dari tahun ke tahun.	Rasio
Tingkat Kemiskinan (Variabel Y)	Tingkat Kemiskinan Sub variabel : Persentase Penduduk Miskin (P0): $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{1-i}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \alpha$ Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) : $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{1-i}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \alpha$ Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{1-i}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \alpha$ Keterangan : $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Naik / turunnya Penduduk Miskin (P0) Naik/ turunnya Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2)	Rasio

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Biasanya berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun dokumen yang diteliti adalah laporan realisasi Penerimaan dalam laporan arus kas di Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga 2020. sampel dan data 2016-2020 yang diperoleh langsung dari <https://sukabumikab.bps.go.id/>. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Purposive merupakan teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan subjek. Sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, subjek yang diteliti akan ditentukan langsung dan berkaitan dengan masalah dan tujuan dari penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini, Peneliti menggunakan melakukan data sekunder, Metode sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung didapat dari laporan-laporan yang tertera serta menulis informasi dengan mengunduh file yang sudah tersedia di situs Badan Pusat Statistik <https://sukabumikab.bps.go.id/>.

3.7 Metode Analisis

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai Kemandirian Keuangan Daerah dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016-2020.

Statistik deskriptif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaruh keterkaitan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

3.7.1 Analisis Trend

Menurut Muktiadji (2009) Analisis Trend merupakan metode analisis data yang bertujuan melakukan estimasi pada masa mendatang untuk melihat kecenderungan meningkat atau menurun pada suatu variabel, pada kurun waktu tertentu. Analisis trend dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui trend Kemandirian Keuangan Daerah. Analisis trend tersebut menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil (*Least Square Method*) untuk mencari garis trend, yaitu suatu perkiraan mengenai nilai a dan b, sehingga jumlah kesalahan kuadrat terkecil (minimum). Rumus yang digunakan adalah :

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan :

Y = Data berkala (Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

x = Waktu

e = error

3.7.2 Uji Hipotesis

3.7.2.1 Uji Korelasi Pearson

Uji Korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), dan Tingkat Kemiskinan (Y) dapat bersifat positif atau negatif. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat dilihat pada :

- a. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *sig. (2-Tailed)* atau ($0,05 < sig. (2-Tailed)$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
- b. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas *sig. (2-Tailed)* atau ($0,05 > sig. (2-Tailed)$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Berikut merupakan pedoman derajat hubungan dalam analisis korelasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai *Pearson Correlation* 0,00 – 0,20: Tidak ada korelasi
- b. Nilai *Pearson Correlation* 0,21 – 0,40: Korelasi lemah
- c. Nilai *Pearson Correlation* 0,41 – 0,60: Korelasi sedang
- d. Nilai *Pearson Correlation* 0,61 – 0,80: Korelasi kuat
- e. Nilai *Pearson Correlation* 0,81 – 1,00: Korelasi sangat kuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

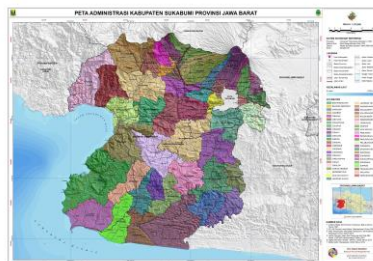
4.1.1 Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lebak di barat. Secara geografis Kabupaten Sukabumi terletak antara 106°49' sampai 107° Bujur Timur 60°57' - 70°25' Lintang selatan mempunyai luas daerah 4.161 km² 11,21 persen dari luar Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas se-Jawa dan Bali. Batas wilayah tersebut 40% berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia/ Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia/ Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong yang dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi dengan wilayah-wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, dimana Kota Sukabumi merupakan salah satu pusat bagi wilayah-wilayah Kabupaten Sukabumi yang mengelilinginya . Jarak dari ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 95 km sedangkan jarak terhadap ibukota Negara sejauh 120 km.

4.1.2 Topografi Kabupaten Sukabumi

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sukabumi



(<http://dptr.sukabumikab.go.id>)

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang cukup luas yaitu ± 419.970 ha. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di bagian selatan dan bergunung di bagian utara dan tengah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.960 m. Kondisi permukaan tanah di Kabupaten Sukabumi bervariasi. Berdasarkan kelas kemiringan, kondisi permukaan tanah di Kabupaten Sukabumi digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu (BPS Kabupaten Sukabumi, 2009):

- 1) Kelas I dengan kemiringan 0 – 8 luasnya sekitar 209.088 ha;
- 2) Kelas II dengan kemiringan 8 – 15 luasnya sekitar 40.998 ha;
- 3) Kelas III dengan kemiringan 15 – 25 luasnya sekitar 40.998 ha;
- 4) Kelas IV dengan kemiringan 25 – 45 luasnya sekitar 59.447 ha;
- 5) Kelas V dengan kemiringan >45 luasnya sekitar 59.447 ha.

Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan. Kegiatan perikanan tangkap banyak dilakukan di 7 kecamatan yang menghadap Samudera Hindia yaitu Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Palabuhanratu, Simpenan dan Cisolok.

4.1.3.1 Visi Misi Kabupaten Sukabumi

4.1.3.1 Visi

Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2010 –2015 mendatang visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera”.

Akhlak Mulia merupakan kualitas sumber daya manusia dengan perilaku tertinggi dan terhormat, yang merujuk pada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 (empat) sifat utama yaitu :

1. *Shiddiq* yang berarti jujur
2. *Amanah* yang berarti dapat dipercaya
3. *Fatonah* yang berarti cerdas
4. *tabligh* yang berarti menyampaikan atau mentransformasikan

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga terwujud masyarakat yang berakhlak mulia, yaitu masyarakat yang

berperilaku lurus dan jujur, saling percaya, cerdas, dan saling mengingatkan untuk berlomba dalam kebaikan dan kemajuan. Maju, merupakan proses melangkah atau bergerak ke depan, menuju keadaan yang lebih baik, lebih produktif, lebih menghasilkan, dan lebih memberikan nilai tambah. Maju dimulai dari dalam, dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional sehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memajukan masyarakat Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sejahtera, adalah kondisi masyarakat dimana tercipta rasa aman, sentosa, dan makmur, tercukupi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, dan sejahtera tidak hanya membangun generasi sekarang dan generasi yang akan datang, namun juga menyiapkan diri sebagai bekal manakala kembali ke haribaan Ilahi nanti.

4.1.3.2 Misi

Sejalan dengan visi diatas, maka ada (tiga) misi utama yang akan dijalankan, yaitu :

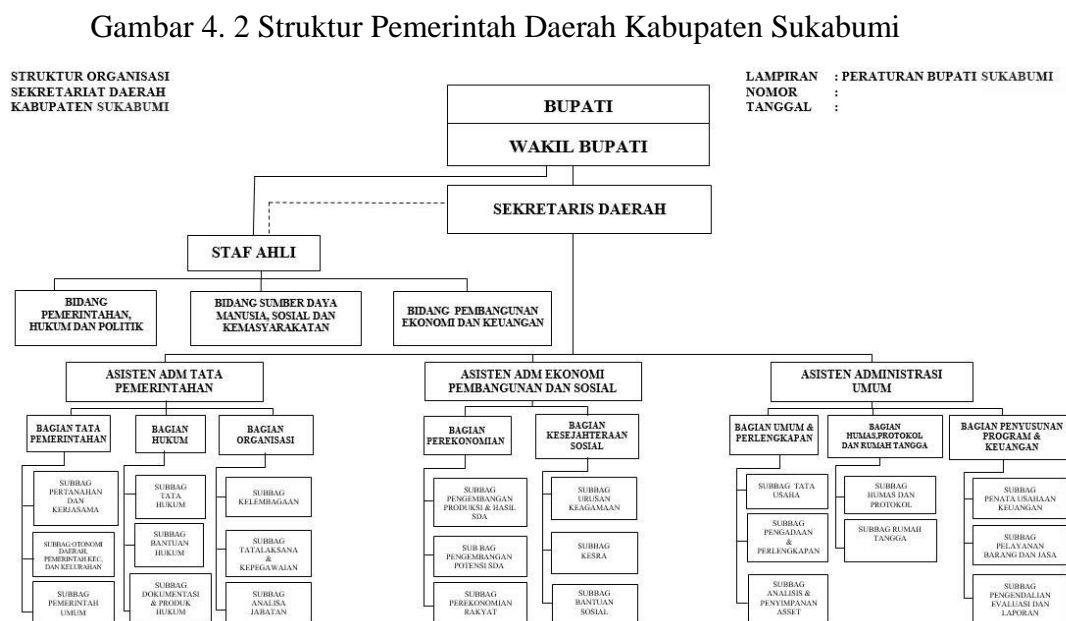
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkemampuan memajukan masyarakat.
3. Membangun perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal, dan berwawasan lingkungan.

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk mencapai Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera, maka rumusan tiga Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, yang bertujuan:
 - 1) Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat.
 - 2) Meningkatkan akses layanan dan kualitas pendidikan.
 - 3) Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan.
 - 4) Mengendalikan perkembangan penduduk, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran.
 - 5) Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkemampuan memajukan masyarakat, yang bertujuan :
 - 1) Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional.
 - 2) Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

- 3) Memajukan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 4) Menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur pemekaran wilayah.
3. Membangun perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal, dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan :
- 1) Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat.
 - 2) Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal dan lembaga keuangan mikro.
 - 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.
 - 4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.

4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Adapun tugas dan wewenang masing-masing perangkat daerah Provinsi

1. Bupati

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
- 3) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wakil Bupati
 - 1) Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 - 2) Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah.
 - 3) Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
 - 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
 - 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
 - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
3. DPRD
 - 1) Membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
 - 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
 - 4) Mengusulkan untuk pengangkatan/pemberhentian Bupati /wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - 5) Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
 - 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris DPRD
 - 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
 - 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- 4) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Sekretaris Daerah
 - 1) Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Dinas Daerah
 - 1) Melaksanakan unsur pelaksana otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah
 - 1) Mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
 - 2) daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit.
 - 3) umum daerah. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

4.2 Kondisi atau Fakta dari Variabel yang Diteliti Kabupaten Sukabumi.

4.2.1 Kemandirian Keuangan daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 dapat diketahui besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer serta Rasio Tingkat Kemandirian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian
2016	548.936.312.98	2.237.365.790.25	24.53%
2017	799.499.855.49	1.949.722.280.22	41%
2018	565.369.087.00	1.964.152.558.00	28.78%
2019	619.788.612.71	2.244.460.685.17	27.61%
2020	636.807.440.90	2.096.832.612.72	30.27%

(Sumber: BPS 2021)

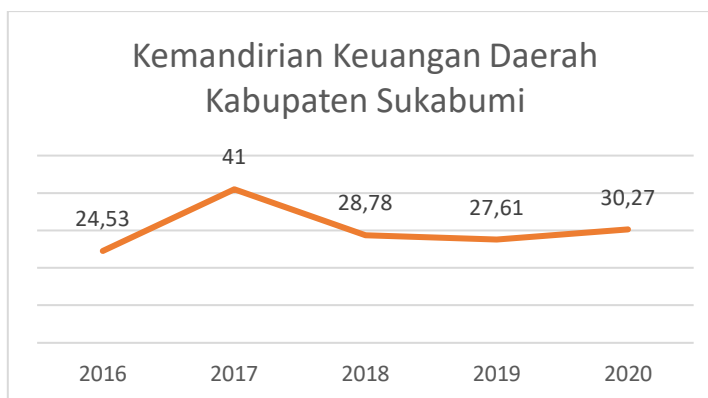
Kemandirian Keuangan Daerah dapat terlihat pada setiap tahunnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Tingkat Efektivitas	Kategori
>75%	Tinggi
>50% - 75%	Sedang
>25% - 50%	Rendah
0 - 25%	Rendah Sekali

Sumber: Badan Pusat Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Sukabumi (dalam %)



Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa :

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 mengalami perubahan kategori dari kategori “Rendah Sekali” mengalami kenaikan menjadi “Rendah” yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2016 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum dapat dikatakan mandiri bahkan belum mendekati mandiri hal ini ditunjukkan dengan data pendapatan asli daerah sebesar 548.936.312.98 dan pendapatan transfer pusat 2.237.365.790.25 dengan persentase 24.53 % dan tergolong kriteria rendah sekali karena persentase berada pada 0 – 25%. Pada tahun 2017 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang mana disebabkan oleh pendapatan asli daerah naik menjadi 799.499.855.49 dan Turunnya pendapatan transfer pusat menjadi 1.949.722.280.22 sehingga persentase menjadi 41 % tapi masih tergolong pada kriteria rendah karena berada pada 25 – 50 %. Pada tahun 2018 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini dilihat dari turunnya pendapatan asli daerah menjadi 565.369.087.00 dan pendapatan transfer pusat

sebesar 1.964.152.558.00 dengan persentase 28,78 % dan tergolong pada kriteria rendah karena persentase berada pada 25% - 50%. Pada tahun 2019 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan pendapatan asli daerah naik menjadi 619.788.612.71 akan tetapi pendapatan transfer pusat lebih besar menjadi 2.261.839.365,88 sehingga persentase menurun menjadi 27,61 % dan tergolong pada kriteria rendah karena berada pada 25% - 50%. Pada tahun 2020 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dilihat dari naiknya pendapatan asli daerah menjadi 636.807.440.90 dan pendapatan transfer pusat sebesar 2.096.832.612.72 dengan persentase 30,27 % dan tergolong pada kriteria rendah karena persentase berada pada 25% - 50%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam aspek keuangan masih ketergantungan dengan pemerintah pusat, di karenakan dalam lima tahun penelitian pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi masih dalam kondisi kemandirian yang rendah. Dalam kondisi saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi harus terus mendorong dan memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang ada. Sehingga dalam peningkatan Pendapatan asli daerah yang meningkat maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukabumi pun akan terus meningkat.

4.2.2 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Dalam mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik menggunakan metode beberapa indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan :

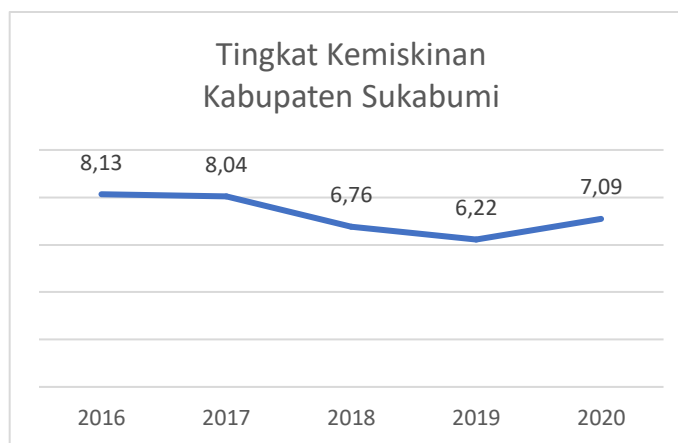
1. Persentase Penduduk Miskin
Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)
adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Dalam perhitungan persentase penduduk terdapat garis kemiskinan. Dalam perhitungannya garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai

pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan Badan Pusat statistik dalam mengukur tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan fakta lapangan. Dalam berita yang di tulis dalam laman <https://jurnalsukabumi.com> tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 153 ribu penduduk dengan persentase penduduk miskin 6,22 persen dan tahun 2020 dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa di Kabupaten Sukabumi ini, terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 175 ribu penduduk dengan persentase penduduk miskin 7,09 persen.

Garis Kemiskinan Nilai Kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi didasari oleh kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 komoditi (padi-padian umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan lainnya). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Perkapita di bawah dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kabupaten Sukabumi memiliki nilai Garis kemiskinan yang bisa dikata cukup rendah tetapi dengan nilai rendah itu masih ada penduduk yang dibawah garis kemiskinan, Data tersebut didapat melalui website resmi Badan Pusat Statistika Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

Gambar 4. 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi

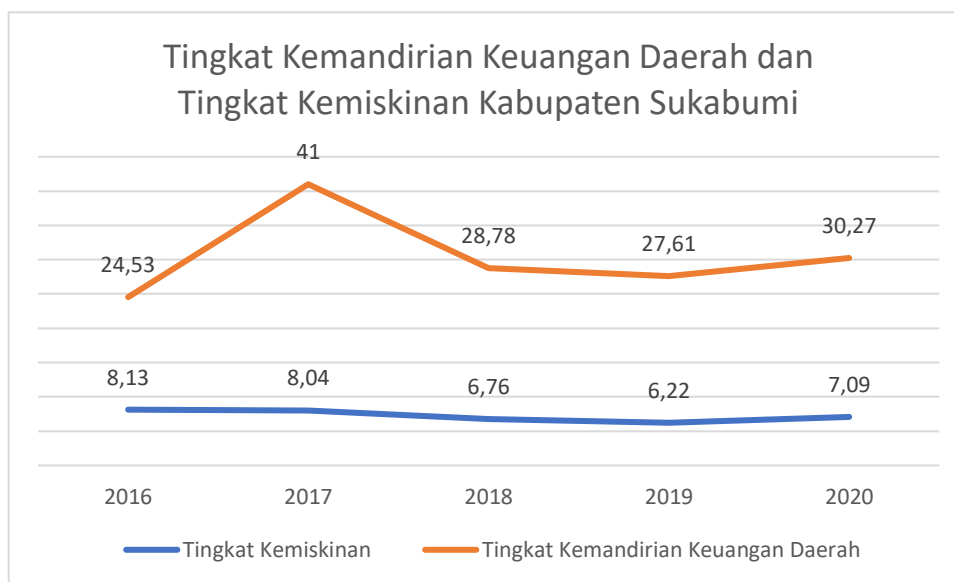


Berdasarkan tabel tersebut, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami prestasi penurunan, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu dari 8.04 menjadi 6.22 pada tahun 2019 namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi 7.09 atau masih lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 8.13. Hal itu diduga karena dipicu oleh pandem covid-19 yang masih mewabah dalam satu tahun terakhir.

4.2.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi

Agar dapat mengetahui hubungan kecenderungan tingkat kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020, berikut ini disajikan tabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan :

Gambar 4. 5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi



Dari kedua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara tingkat kemandirian dan tingkat kemiskinan pada Kabupaten Sukabumi tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan ditunjukkan adanya kenaikan tingkat kemandirian tahun 2017 yang diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

4.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data setelah semua sumber data terkumpul menjadi informasi baru agar karakteristik data tersebut mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis yang terdiri dari statistik deskriptif dan uji hipotesis t. Penelitian ini menggunakan software SPSS Ver. 26, berikut penjelasannya.

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji deskriptif suatu data menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisis deskriptif penulis lakukan dengan menggunakan software SPSS Ver 26 yang kemudian memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan Daerah	5	24.53	41.00	30.438 0	6.26967
Tingkat Kemiskinan	5	6.22	8.13	7.2480	.82539
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 26 (2022)

Dari output statistik deskriptif pada tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. N = 5 berarti jumlah data yang diolah dalam penelitian ini adalah 5, data selama 5 tahun yang terdiri dari data variabel Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Kemandirian Keuangan Daerah terendah tercatat sebesar 24.43 sedangkan yang tertinggi 41.00 dengan rata-rata 30.4380 dan standar deviasi 6.26967 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar +6.26967, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar -6.26967.
3. Tingkat Kemiskinan terendah tercatat 6.22 sedangkan tertinggi 81.3 dengan rata-rata 7.2480 dan standar deviasi 0,82539 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel Tingkat Kemiskinan sebesar +0,82539 dan penurunan maksimum dari rata-rata variabel Tingkat Kemiskinan sebesar -0,82539.

4.3.2 Penerapan Model Untuk Meramalkan Trend Tingkat Kemandirian Keuangan daerah dan Trend Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Dalam menentukan model maka dilakukan analisis trend untuk tujuan peramalan dimana variabel dependen (tak bebas) dan variabel independen (bebas) merupakan deretan waktu. Trend garis lurus (linier) adalah suatu trend yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus.

4.3.3.1 Tingkat kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Analisis Trend Metode *Least Square*.

Pada data Tingkat kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 terlihat bahwa Kemandirian Keuangan daerah paling tinggi ada pada tahun 2018, dan paling rendah pada tahun 2016. Adapun metode yang digunakan untuk analisis time series ini adalah Metode Least Square. Rumus yang digunakan dalam Metode Least Square adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \quad b = \frac{\Sigma yx}{\Sigma x^2}$$

Dengan :

Y = Data berkala (time series)

a = Nilai trend pada tahun dasar

b = Rata-rata perubahan nilai trend setiap tahun

X = variabel waktu (tahun)

Adapun tahapan dalam penyelesaian dengan menggunakan metode least square adalah sebagai berikut:

Menyiapkan tabel data Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (data ganjil).

Tabel 4. 4 Tabel Metode Least Square Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun	kemandirian keuangan daerah (y)	X	Xy	x ²	y ²
2016	24.53	-2	-49.06	4	601.7209
2017	41	-1	-41	1	1681
2018	28.78	0	0	0	828.2884
2019	27.61	1	27.61	1	762.3121
2020	30.27	2	30.27	4	916.2729
Jumlah	152.19	0	-32.18	10	4789.5943

Pada tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa total nilai dari data trend kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah senilai 152.19 dan memiliki variabel bebas yaitu periode waktu ganjil dengan melihat jumlah tahun yang digunakan, dengan nilai variabel adalah nol. Untuk periode waktu ganjil, nilai X: ...-3, -2, -1, 0, + 1, 2, 3, ..., artinya untuk data ganjil itu sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan nilai X yaitu jarak antara dua waktu diberi satu satuan, diatas nol diberi tanda negatif (-), dan dibawahnya diberi tanda positif (+).

Sehingga dapat dilihat dari nilai X di atas selama 5 tahun menunjukkan nilai X yaitu: ...-2, -1, 0, +1, +2, ... Kemudian nilai dari XY di atas diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kemandirian Keuangan daerah dengan variabel X sehingga nilai XY = -32.18 dan nilai dari x^2 diperoleh dengan cara mengkuadratkan nilai dari X sehingga diperoleh $x^2 = 10$, begitupun dengan nilai dari y^2 yaitu dengan cara mengkuadratkan nilai dari Y itu sendiri sehingga diperoleh $y^2 = 4789.5943$.

2. Menentukan Nilai A dan B

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\Sigma yx}{\Sigma x^2}$$

$$a = \frac{152.19}{5} \quad \text{dan} \quad \frac{-32.18}{10}$$

$$a = 30.438 \quad \text{dan} \quad -3.218$$

3. Persamaan Garis Trendnya adalah :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 30.438 + (-3.218)X$$

Dari hasil nilai a dan b diatas maka model yang diperoleh dalam metode least square dengan persamaan garis trendnya yaitu $Y = 30.438 + (-3.218)X$, dengan X adalah kemandirian keuangan daerah tahun 2020. Dari model yang telah diperoleh diatas menunjukkan bahwa untuk meramalkan pengeluaran perkapita yang dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 dapat diperkirakan.

4. Perkiraan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021

$$Y = a + bx$$

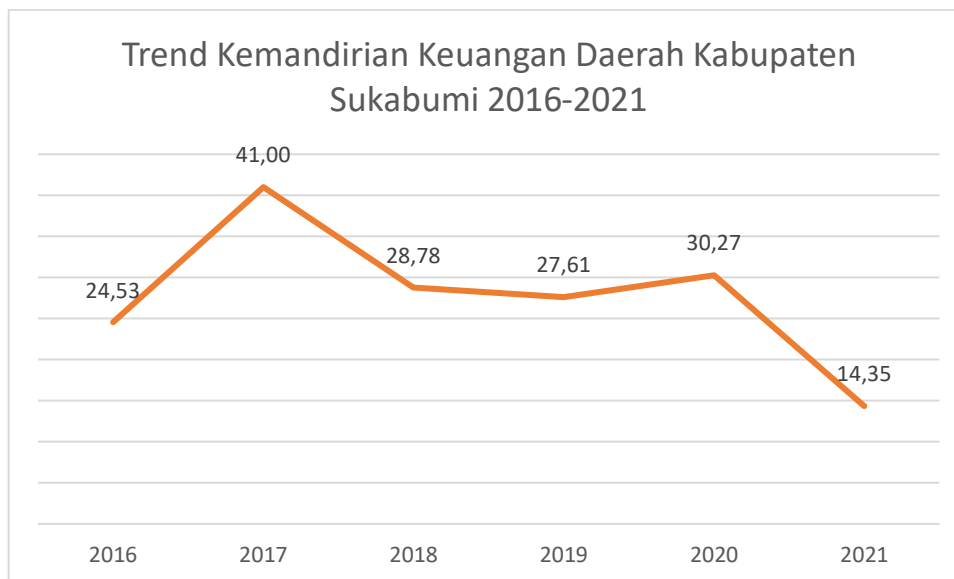
$$Y = 30.438 + (-3.218) 5$$

$$Y = 30.438 + (-16.09)$$

$$Y = 14.348$$

Dari hasil ramalan kemandirian keuangan daerah tahun 2021 dari model yang telah diperoleh menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 30.438 dan nilai (bx) -16.09, menjadikan kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan yakni pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 30.27 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 14.348 mengalami penurunan sebesar 15.92 %.

Gambar 4. 6 Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021



Berdasarkan gambar 4.6 terlihat perkiraan Trend kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021 mengalami Ketidakkonsistenan atau fluktuatif dimana pada tahun 2016 berada pada nilai 24.53 pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 41.00 pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh nilai 28.78, tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga berada pada nilai 27.61, tahun 2020 kembali mengalami peningkatan berada pada nilai 30.27 dan perkiraan untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar berada pada nilai 14.348.

4.3.3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dengan Analisis Trend Metode *Least Square*.

Pada data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 terlihat bahwa Kemandirian Keuangan daerah paling tinggi ada pada tahun 2020, dan paling rendah pada tahun 2018. Adapun metode yang digunakan untuk analisis time series ini adalah Metode Least Square. Rumus yang digunakan dalam Metode Least Square adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \quad b = \frac{\Sigma yx}{\Sigma x^2}$$

Dengan :

Y = Data berkala (time series)

a = Nilai trend pada tahun dasar

b = Rata-rata perubahan nilai trend setiap tahun

X = variabel waktu (tahun)

Adapun tahapan dalam penyelesaian dengan menggunakan metode least square adalah sebagai berikut:

Menyiapkan tabel data Trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi (data ganjil).

Tabel 4. 5 Tabel Metode Least Square Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi

Tahun	Tingkat Kemiskinan (y)	X	Xy	x ²	y ²
2016	8.13	-2	-16.26	4	66.0969
2017	8.04	-1	-8.04	1	64.6416
2018	6.76	0	0	0	45.6976
2019	6.22	1	6.22	1	38.6884
2020	7.09	2	14.18	4	50.2681
Jumlah	36.24	0	-3.9	10	265.3926

Pada tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa total nilai dari data trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah senilai 36.24 dan memiliki variabel bebas yaitu periode waktu ganjil dengan melihat jumlah tahun yang digunakan, dengan nilai variabel adalah nol. Untuk periode waktu ganjil, nilai X: ...-3, -2, -1, 0, + 1, 2, 3, ..., artinya untuk data ganjil itu sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan nilai X yaitu jarak antara dua waktu diberi satu satuan, diatas nol diberi tanda negatif (-), dan dibawahnya diberi tanda positif (+). Sehingga dapat dilihat dari nilai X di atas selama 5 tahun menunjukkan nilai X yaitu: ...- 2, -1, 0, + 1, + 2, ... Kemudian nilai dari XY di atas diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kemandirian Keuangan daerah dengan variabel X sehingga nilai XY = -3.9 dan nilai dari x² diperoleh dengan cara mengkuadratkan nilai dari X sehingga diperoleh x² = 10, begitupun dengan nilai dari y² yaitu dengan cara mengkuadratkan nilai dari Y itu sendiri sehingga diperoleh y² = 265.3926

2. Menentukan Nilai A dan B

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \text{ dan } b = \frac{\Sigma yx}{\Sigma x^2}$$

$$a = \frac{36.24}{5} \text{ dan } b = \frac{-3.9}{10}$$

$$a = 7.248 \text{ dan } b = -0.39$$

3. Persamaan Garis Trendnya adalah :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 7.248 + (-0.39)X$$

Dari hasil nilai a dan b diatas maka model yang diperoleh dalam metode least square dengan persamaan garis trendnya yaitu $Y = 7.248 + (-0.39)X$, dengan X adalah Tingkat Kemiskinan tahun 2020. Dari model yang telah diperoleh diatas menunjukkan bahwa untuk meramalkan Tingkat Kemiskinan yang dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 dapat diperkirakan.

4. Perkiraan Tingkat Kemiskinan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021

$$Y = a + bx$$

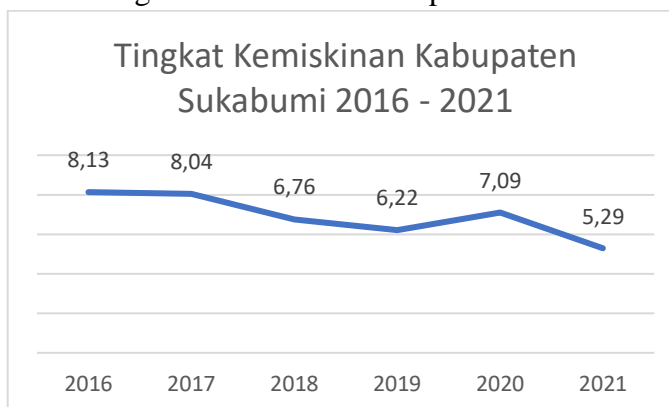
$$Y = 7.248 + (-0.39) 5$$

$$Y = 7.248 + (-1.95)$$

$$Y = 5.298$$

Dari hasil ramalan Tingkat Kemiskinan tahun 2021 dari model yang telah diperoleh menunjukkan bahwa dengan nilai konstanta (a) sebesar 7.248 dan nilai (bx) - 1.95, menjadikan Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan yakni pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 7.09 dan pada tahun 2021 turun menjadi 5.29 Trend Tingkat Kemiskinan turun sebesar 1,8.

Gambar 4. 7 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi 2016-2021

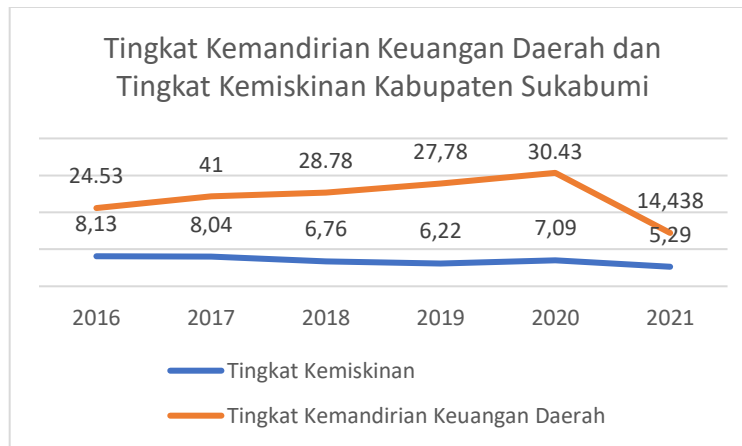


Berdasarkan gambar 4.7 diatas terlihat perkiraan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021 mengalami Ketidakkonsistenan atau fluktuatif dimana pada tahun 2016 berada pada nilai 8.13 pada tahun 2017 mengalami Penurunan menjadi 8.04 pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh nilai 6.76, tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga berada pada nilai 6.22, tahun 2020 mengalami peningkatan berada pada nilai 7.09 dan perkiraan untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar berada pada nilai 5.29.

4.3.3.3 Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016-2021 memiliki Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan yang fluktuatif. Angka dan persentasi tersebut tertuang dalam gambar dibawah ini :

Gambar 4. 8 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021



Pada gambar 4.8 disajikan persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sukabumi paling rendah dimana hanya terdapat angka 24,53% dan jika dalam teori yang ada maka ini termasuk dalam kondisi rendah sekali, tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 16,47%, tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar -12,22%, tahun 2019 kembali penurunan dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan Kembali sebesar -1,17%, dan tahun 2020 kembali naik dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,66% .Rata-rata persentase tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kategori rendah dengan nilai 30,43%. Setelah analisis data menggunakan analisis trend dengan Metode *Least Square* Tingkat kemandirian Keuangan Daerah Sukabumi menurun tajam menjadi 14.438. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 8,13 persen dan mengalami penurunan menjadi sebesar 6,22 persen pada tahun 2019. Kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi cukup signifikan. Dari data yang ada pada tahun 2019, Tingkat Kemiskinan hanya 6,22 persen sementara untuk tahun 2020 menjadi 7,09 persen. Artinya ada kenaikan sebanyak 0,87 persen. Setelah analisis data menggunakan analisis trend dengan Metode *Least Square* Tingkat Kemiskinan Sukabumi menurun menjadi 5,298.

4.3.4 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis akan dilakukan Uji Korelasi Pearson.

4.3.4.1 Uji Korelasi Pearson

Uji Korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), dan Tingkat Kemiskinan (Y) dapat bersifat positif atau negatif. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat dilihat pada :

1. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka berkorelasi.
2. Jika nilai Signifikansi $>0,05$ maka tidak berkorelasi.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Korelasi Pearson

		Correlations	
		Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Kemiskinan
Kemandirian Keuangan Daerah	Pearson Correlation	1	.705
	Sig. (2-tailed)		.118
	N	6	6
Tingkat Kemiskinan	Pearson Correlation	.705	1
	Sig. (2-tailed)	.118	
	N	6	6

(Sumber : Output pengolahan dari SPSS 25 (2022))

Berdasarkan Tabel 4. dari hasil uji analisis korelasi Pearson di atas menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah 0,705 yang dihitung dengan koefisien korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hubungan pada nilai *pearson correlation* dalam analisis korelasi sebesar 0,705 berada pada tingkat nilai korelasi sangat kuat (0,61 sampai dengan 0,80). Serta diketahui juga nilai *sig. (2-tailed)* adalah 0,118 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dalam artian, bahwa jika nilai *sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka hubungan variabel antara independen dan dependen tidak saling berkorelasi dengan keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tidak memiliki hubungan dan Kuat antara Kemandirian keuangan Daerah, dengan Tingkat Kemiskinan.

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Perkembangan Kecenderungan (Trend) Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Amalia and Purbadharmaja, 2015). Mahmudi (2018) menjelaskan kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka kemandirian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan asli daerah tersebut yang paling banyak menyumbang adalah pajak daerah. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan, karena salah satu program unggulan Kabupaten Sukabumi adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif maka dari itu dapat mengundang wisatawan dari Kabupaten Sukabumi maupun luar Kabupaten Sukabumi untuk berkunjung ke Kabupaten Sukabumi yang nantinya dapat menambah penghasilan Kabupaten Sukabumi melalui Pajak hotel, Pajak restoran, dan pajak hiburan tersebut. Kabupaten Sukabumi memiliki potensi penerimaan melalui pajak masih dapat ditingkatkan dengan dilakukannya berbagai event tahunan dan gelaran yang dapat mengundang minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sukabumi untuk menikmati kuliner dan menginap di hotel di Kabupaten Sukabumi.

Tahun 2020, Pandemi datang dan perekonomian pun sangat turun, termasuk pemasukan daerah, karena saat pandemi semua dibatasi sampai dengan adanya karantina dan membekukan kegiatan agar memutus rantai virus covid-19. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mencari jalan agar penerimaan daerah tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini. Maka dari itu, terdapat kebijakan keringanan dalam membayar pajak untuk para wajib pajak seperti masa pembayaran pajak diperpanjang, pengurangan pajak tertuang BPHTB, bebas denda PBB, bebas sanksi administrasi pembayaran piutang pajak daerah (self), pengurangan pembayaran BPHTB, diskon pajak PBB P2 dan lain-lain untuk bulan Februari 25%, bulan Maret 15%, bulan April 10%, dan bebas denda dari tahun 2013-2021. Keringan-keringan tersebut dilakukan untuk meringankan WP namun daerah tetap ada penerimaan daerah seperti biasanya. Serta pelayanan pajak pun menjadi berbasis layanan elektronik seperti konsultasi via Whatsapp, layanan E-validasi BPHTB, E-Sppt. Berdasarkan analisis trend menggunakan metode *least Square* maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang besar sebesar 15.92%.

4.4.2 Perkembangan Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020.

Tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir pembangunan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka kemiskinan akan menurun dan sebaliknya jika PDRB menurun maka kemiskinan akan meningkat. PDRB setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun sangatlah diharapkan jika peningkatan tersebut haruslah diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum, peningkatan kesempatan kerja serta penurunan angka kemiskinan. Hal sama terjadi saat pandemi Covid-19, dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi meningkat menjadi 7.09. Trend penurunan angka kemiskinan empat dekade terakhir yang disertai peningkatan kemiskinan pada beberapa periode “krisis” menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan kesejahteraan sangat dinamis. Selain itu, isu kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni bukan semata terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses ke pendidikan serta kesehatan, dan dimensi lain. Mereka yang berada dalam kemiskinan adalah mereka yang tidak bekerja secara teratur atau terus menerus, atau yang bekerja paruh waktu saja. Dengan demikian, mereka hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang maupun tingkat penghasilan yang diinginkan saja, dan tidak mau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan dan tidak semua orang menganggur itu selalu miskin.

Berdasarkan analisis trend menggunakan metode *Least Square* tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami trend penurunan pada tahun 2021, yang sebelumnya tingkat kemiskinan pada tahun 2020 adalah 7.09 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 1.8 menjadi 5.298.

4.4.3 Hubungan Antara Kecenderungan (Trend) Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kecenderungan (Trend) Tingkat Kemiskinan.

Hasil dari pengujian korelasi pearson menunjukkan bahwa kemandirian Keuangan daerah tidak memiliki hubungan korelasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hubungan pada nilai *pearson correlation* dalam analisis korelasi sebesar 0,705 berada pada tingkat nilai korelasi kuat (0,61 sampai dengan 0,80). Serta diketahui juga nilai *sig. (2-tailed)* adalah 0,118 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dalam artian, bahwa jika nilai *sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka hubungan variabel antara independen dan dependen tidak saling berkorelasi dengan keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tidak memiliki hubungan dan kuat antara kemandirian keuangan daerah, dengan tingkat kemiskinan. Hamzah (2008:17) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya jika

kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Kuncoro (2014) dalam bukunya yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis awal yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan antara kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemiskinan. Kondisi adanya pandemi covid-19 ini mengubah teori dan penelitian terdahulu sehingga yang semula variabel-variabel saling mempengaruhi, menjadi tidak saling mempengaruhi. Hal ini terkalahkan oleh faktor penting saat ini yaitu kesehatan. Hal ini dikemukakan oleh Presiden RI Bapak Jokowi dalam (Bisnis.com, 2021) bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah kesehatan yang dinomor satukan dan ekonomi akan mengikuti dengan sendirinya, hal serupa dikemukakan oleh Ketua Satgas Pemulihan dan transformasi ekonomi nasional Budi Gunadi Sadikin bahwa kesehatan masyarakat menjadi faktor utama agar program pemulihan ekonomi negara bisa berjalan sukses.

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai tahun 2021 termasuk pada kriteria rendah yang berarti peran pemerintah pusat mulai mengurang daripada pemerintah daerah itu sendiri (daerah yang mulai mampu melaksanakan otonomi daerahnya). Tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai tahun 2021 yang masih rendah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Sukabumi terhadap sumber dana ekstern masih tinggi. Sayangnya, alokasi transfer pada pemerintah daerah lebih banyak didasarkan pada aspek belanja pegawai dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang mana rendahnya PAD menuntut tingginya pendapatan transfer-dana perimbangan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi agar dapat membiayai kegiatan pemerintahannya. Dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri. Kabupaten Sukabumi memulai dan mendorong minat masyarakat akan sumber daya yang tersedia. Menurut Boni (2021) Mengembangkan komunitas bambu di Kabupaten Sukabumi seharusnya mudah, karena akses menuju ke Kabupaten Sukabumi sekarang lebih mudah, itu juga seharusnya bisa merubah jalan perekonomian di Kabupaten Sukabumi khususnya para masyarakat penggiat bambu.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah meneliti bahasa pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa analisis trend menunjukkan untuk kecenderungan tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki nilai menurun untuk tahun 2021 mendatang dengan rasio 14.438 yang pada tahun 2020 sebesar 30.96.
2. Pada analisis trend menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan memiliki nilai menurun pada tahun 2021 mendatang dengan rasio 5.29 yang pada tahun 2020 sebesar 7.06.
3. Demikian dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang kuat antara kecenderungan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap kecenderungan tingkat kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sampai dengan 2021.

5.2 Saran

1. Saran untuk kegunaan akademik/teoritik
Pada umumnya secara teoritik di dalam mata kuliah akuntansi publik atau akuntansi pemerintahan, bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan, namun pada penelitian kali ini adalah tidak adanya Hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemiskinan yang disebabkan masing-masing mengalami penurunan karena adanya kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi Covid-19.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
Apabila tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, lebih baik menambahkan variabel yang lebih bervariasi dan menambah jumlah observasi penelitian seperti membandingkan antar daerah-daerah yang ada dan membandingkan observasi penelitian ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/non kota.
3. Saran untuk kegunaan praktis
 - a. Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan lebih meningkatkan lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah agar pembangunan daerah kabupaten termasuk infrastruktur dapat berjalan lagi dan mewujudkan kabupaten jasa dan industri pariwisata ekonomi kreatif dengan ditunjang oleh pembangunan yang baik. Dengan begitu, tingkat

kemiskinan akan menurun, disamping pendapatan asli daerah yang meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

- b. Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar berusaha untuk mengarahkan pengeluaran keuangan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Andri Bayo, *Kemiskinan Dan Strategi Memberantas Kemiskinan*, (Yogyakarta, Liberty Offset, 2009)
- Badan Pusat Statistik., 2022. *Pengeluaran per kapita*. Available at: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/197>.
- Bastian, Indra., 2014. "Lingkup Akuntansi Sektor Publik." 1–52.
- Biduri, Sarwenda., 2018. "Akuntansi Sektor Publik." 1–196.
- BPS. (2016). *Katalog BPS : 1102001.3502, Ponorogo Dalam Angka, Ponorogo*.
- Halim., 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th edn. Jakarta: Salemba.
- Hamidi., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang:UMM press
- Hamzah, Ardi. 2008. "Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan): Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur) Periode 2001- 2006". Simposium Nasional Akuntansi 11. Jakarta: Universitas Trunojoyo.
- Haryadi, Agus. 2005 *Kemiskinan, Mentalitas Budaya*, Yogyakarta : Pustaka Rahima,
- Inapty, B. A. *et al.*, 2017. *Analisis Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kota Semarang, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Journalsukabumi.com (2021), Menilik Angka Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Selama Pandemi, www.journalsukabumi.com. Tersedia pada : <https://journalsukabumi.com/2021/11/22/menilik-angka-kemiskinan-di-kab-sukabumi-selama-pandemi/>. (diakses 11 Juli 2022)
- Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia (2020) *Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi*, kemendagri.go.id. Tersedia pada: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/28776/kerja-sama-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-untuk-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi>.

- Kencana Syafie, Inu, M.Si, 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kusumawati, L. dan Wiksuana, I. G. B. (2018) “PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI,” *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), hal. 2592–2620.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). “Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan”. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mahmudi. (2011) “*Manajemen Keuangan Daerah*” Jakarta : PT Erlangga
- Mahmudi., 2018. ‘Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download’, p. 141.
- Majid, J., 2019. *Leasing di Indonesia*, Yogyakarta. Available at: http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx.
- Mardiasmo., 2018. ‘Akuntansi Sektor Publik’, *Akuntansi Sektor Publik*, p. 7.
- Mudrajad Kuncoro. (2014) “*Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*” Edisi 3. Universitas Gadjah Mada : Erlangga.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Salam, Handi (2021) Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi Bertambah 21,80 Ribu jiwa, www.radarsukabumi.com. Tersedia pada : Ini Datanya <https://radarsukabumi.com/berita-utama/duh-penduduk-miskin-di-kabupaten-sukabumi-bertambah-2180-ribu-jiwa-ini-datanya/> (diakses 18 Juni 2022)
- Sugiyono, 2015. ‘Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif , kualitatif dan r&d’, p. 456.
- Sukabumi, kabar (2022), Pentahelix, Dorong Perekonomian Sektor Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Sukabumi, www.kabarsukabumi.com Tersedia pada : <https://kabarsukabumi.com/news/3090/pentahelix-dorong-perekonomian-sektor-pariwisata-dan-pelaku-ekonomi-kreatif-kabupaten-sukabumi> (Di akses 9 Juni 2022)
- Sunarno, Siswanto, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Rasyid, Ryaas. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sonny Harry B Harmadi. 2007. Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , 'DODP Warta Demografi tahun ke 37. No 3 tahun 2007. Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Suryanata, S., 2019. Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan di Kota Depok. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), pp.372-389.
- Suryawati, Chriswardani. (2005). "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional". *JMPK* (Vol 8 No3). Hlm 121-129.
- Syaukani et.al (2009) Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Aprizal

Alamat : Jl. Lingkar Dramaga, Dramaga Lebaksari No. 197, RT02/02, Desa
Dramaga kec Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 19 Maret 1998

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Margajaya 1
- SMP : SMP Daarul Uluum Lido
- SMA : MA Daarul Uluum Lido
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022
Peneliti

(Dwi Aprizal)

LAMPIRAN

Lampiran 1

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI MENURUT KOMPONEN PENERIMAAN
(RIBU RUPIAH), 2016-2020**

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Pendapatan Daerah</i>	3.404.491.216,86	3.750.151.137,88	3.762.187.754,00	3.841.842.987,18	3.998.482.445,06
Pendapatan Asli Daerah	548.936.312,98	799.499.855,49	565.369.087,00	619.788.612,71	636.807.440,90
Pajak Daerah	205.356.201,32	236.812.074,31	235.667.582,00	267.563.178,18	268.957.000,00
Retribusi Daerah	34.476.009,74	41.651.539,82	38.981.861,00	31.584.515,37	24.396.500,00
Hasil Perusahaan	8.542.236,65	9.478.519,98	9.724.224,00	8.484.535,61	10.684.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	300.561.865,27	511.557.721,37	280.995.420,00	312.156.383,55	332.769.940,90
Dana Perimbangan	2.237.365.790,25	1.949.722.280,22	1.964.152.558,00	2.244.460.685,17	2.096.832.612,72
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	147.797.397,19	-	151.041.421,00	-	151.039.842,72
Dana Alokasi Umum	1.595.761.459,00	-	1.580.414.660,00	1.654.343.840,00	1.641.881.762,00
Dana Alokasi Khusus	493.806.934,07		232.696.477,00	590.116.845,17	303.911.008,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	618.189.113,62	1.000.929.002,17	1.232.666.109,00	977.593.689,30	1.264.842.391,44
PEMBIAYAAN DAERAH <i>Local</i>	275.750.589,62	276.094.309,48	330.601.315,00	273.222.766,20	180.614.087,05
JUMLAH/Total	3.680.241.806,48	4.026.245.447,36	4.092.789.069,00	4.115.065.753,38	4.179.096.532,11

Data APBD

Lampiran 2
REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI (RIBU RUPIAH)

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.875.795.088,11	1.879.659.665,23	2.007.051.704,00	2.139.542.303,27	2.316.420.547,66
Belanja Pegawai	1.367.357.917,80	1.243.626.472,85	1.360.714.532,00	1.404.959.221,86	1.433.458.835,49
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi	3.125.567,50	2.527.326,00			
Belanja Hibah	42.576.479,42	56.560.855,49	78.014.222,00	99.028.476,71	210.080.320,10
Belanja Bantuan Sosial	6.842.800,00	9.076.516,00	23.631.000,00	23.040.000,00	26.580.000,00
Belanja Bagi Hasil	33.709.404,65	33.853.478,40	39.261.998,00	39.117.841,13	44.003.025,00
Belanja Bantuan Keuangan	419.040.712,24	528.423.723,02	489.485.880,00	569.031.110,08	590.798.367,07
Pengeluaran Tidak Terduga	3.142.206,51	5.591.293,48	15.944.072,00	4.365.653,50	11.500.000,00
BELANJA LANGSUNG	1.512.787.070,19	1.795.269.892,78	1.825.125.341,00	1.942.278.065,12	1.832.675.984,45
Belanja Pegawai	152.891.736,90		156.513.147,00	163.656.785,41	217.528.971,33
Belanja Barang dan Jasa	808.634.719,42	1.249.429.385,75	1.054.231.084,00	1.174.726.246,14	1.085.638.380,80
Belanja Modal	551.260.613,87	545.840.507,03	603.895.033,57	614.381.110,00	529.508.632,33

PEMBIAYAAN DAERAH	291.659.648,18	351.315.889,34	260.612.024,00	33.245.384,99	30.000.000,00
JUMLAH/Total	3.680.241.806,48	4.026.245.447,36	4.092.789.069,00	4.115.065.753,38	4.179.096.532,11

Lampiran 3
Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin , Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, 2013–2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Target Angka Kemiskinan	Realisasi Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)
2016	270.055	198.7	1.21	0.3	8,31	8.13	102,17
2017	284.603	197.1	1	0.24	8,08	8.04	100,50
2018	302.213	166.3	0.86	0.19	7,88	6.76	114,21
2019	309.676	153.3	0.66	0.11	7,70	6.22	119,22
2020	328.284	175.1	0.8	0.12	7,55	7.09	106,09